# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## Literatur Review

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan peranan World Food Programme terhadap krisis pangan ialah Peranan World Food Programme (WFP) Melalui Program Food For Assets (FFA) Dalam Upaya Mengurangi Potensi Rawan Pangan Di Indonesia, yaitu skripsi oleh Elin Dewanti dari Jurusan Hubungan Internasional Universitas Komputer Indonesia. Penelitian ini mendeskripsikan peran World Food Programme dalam Upaya Mengurangi Potensi Rawan Pangan di Indonesia.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan peranan World Food Pragramme melalui Programme Food For Assets (FFA) yang bertujuan untuk mengurangi potensi rawan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diidentifikasi sebagai salah satu yang paling rawan di Indonesia dalam hal kesiapan dan kapasitas untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Upaya yang telah dilakukan World Food Programme adalah mengembangkan cara-cara tambahan untuk mengurangi potensi rawan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan sambil beradaptasi terhadap perubahan iklim, selain adanya berbagai upaya yang dilakukan oleh World Food Programme melalui program Food For Assets di Nusa Tenggara Barat, ada pula beberapa kendala yang dihadapi oleh World Food

Programme adalah persoalan kesulitan dalam persoalan akses jalan ke wilayah yang mengalami rawan pangan.[[1]](#footnote-1)

Penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi dalam pembahasan adalah Peranan World Food Programme Terhadap Penanganan Krisis Pangan di Suriah, yaitu skripsi oleh Olvie Tryani Pontoh dari Jurusan Hubungan Internasional Universitas Hassanudin. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana peran dari World Food Programme dalam menangani krisis pangan di Suriah.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan Peranan World Food Programme Terhadap Krisis Pangan Krisis pangan yang terjadi di Suriah akibat kekeringan selama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2006 dan diperparah dengan adanya konflik sipil yang meledak pada tahun 2011 antara para demonstran yang menuntut pengunduran diri Presiden Bashar Al-Assad dengan pemeintah Suriah yang saat itu menggunakan kekerasan secara brutal untuk menghentikan massa, konflik yang berubah menjadi konflik militer tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses makanan karena terutama masalah keamanan. Dalam mendistribusikan bantuannnya WFP memiliki beberapa hambatan yang berasal dari eksternal seperti masalah keamanan, serangan mortir dan roket yang tercatat per November 2015 mencapai lebih dari 4.000, akses transportasi ditutup oleh pihak militan, juga masalah internal seperti kurangnya sumber daya dan dana juga menjadi masalah yang tidak dapat terhindarkan mengingat dana WFP berasal dari donor sukarela.[[2]](#footnote-2)

Penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi dalam pembahasan adalah Upaya World Food Programme (WFP) Dalam Menangani Ketidaktangguhan Pangan di Sierra Leone, yaitu skripsi oleh I Gede Made Ngurah Perdana Yoga Yanugeraha dari Jurusan Hubungan Internasional Universitas Udayana. Penelitian mendeskripsikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh World Food Programme dalam menangani ketidaktangguhan pangan di Sierra Leone.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa upaya World Food Programme dalam menangani ketidaktangguhan pangan di Sierra Leone yang dikategorikan sebagai negara yang berpenghasilan sangat buruk oleh Central Intelligance Agency (CIA), karena terjadinya perang sipil yang melanda negara tersebut selama 11 tahun. Banyaknya infrastruktur yang hancur seperti pertanian yang merupakan infrastruktur yang paling utama di Sierra Leone, karena banyak penduduk yang menggantungkan hiudp mereka pada sektor ini. WFP mengeluarkan program seperti Protected Relief and Recovery Operation (PRRO) dan Country Programme (CP). Kedua programme tersebut dikeluarkan oleh WFP bertujuan untuk mengurangi adanya pengangguran, meningkatkan akses kepada bahan pangan, memperbaiki nutrisi dan gizi terhadap, anak-anak, ibu hamil, keppada penderita HIV, AIDS, dan juga TB. Beberapa program sedikitnya berhasil dijalankan, seperti yang ada di PRRO, keberhasilannya berupa memberikan lahan pekerjaan kepada pengangguran-pengangguran untuk bisa mendapatkan uang dan bisa membeli bahan pangan untuk kelangsungan hiudp mereka, memperbaiki sistem pertanian yang hancur, mengembalikan para pengungsi yang mengungsi di luar daerah Sierra Leone untuk ikut membantu dalam perbaikan infrastruktur, meningkatkan skes terhadap bahan pangan dan juga akses ke pasar-pasar. Kegiatan-kegiatan PRRO memiliki 4 pilar seperti Feeding School, Food for Training, Food for Work, dan Maternal and Child Health and Nutrition untuk melancarkan proses pengerjaan pada program PRRO. CP yang merupakan program berupa pemberian pangan tambahan ke puskesmas tujuan, Feeding School ke sekolah-sekolah dasar, mendukung nutrisi dan mengobati penduduk yang terkena HIV, AIDS<dan TB, mengurangi kekurangan gizi, lebih berfokus pada peningkatan partisipasi pendidikan dasar di sekolah-sekolah daerah utara Sierra Leone yang mengalami kemiskinan dan ketidaktangguhan pangan.[[3]](#footnote-3)

Ketiga penelitian tersebut belum menganalisis lebih jauh tentang peranan Food Agriculture Organization melalui World Food Programme dan upayanya dalam menangani krisis pangan yang terjadi di Yaman. Oleh karena itu, penulis merencanakan penelitian skripsi tersebut dengan judul : **“PERANAN FOOD AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO) MELALUI WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) DALAM PENANGANAN KRISIS PANGAN DI YAMAN.”**

## Kerangka Teoritis

Untuk mempermudah proses penelitian, diperlukan adanya landasan berpijak untuk memperkuat analisa. Maka dalam melakukan pengamatan dan menganalisis masalah yang diangkat, diperlukan landasan sejumlah teori dari pakar yang dianggap relevan dengan masalah yang diajukan oleh penulis. Kerangka acuan sangat dibutuhkan dalam penulisan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian untuk membantu memahami dan menganalisis permasalahan. Kerangka acuan ini ditopang oleh pendapat pakar yang berkompetensi dalam bidang kajian yang relevan dengan masalah yang diangkat penulis agar analisis yang dilakukan tidak melenceng dari jalur pembahasan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai sarana dalam memahami suatu masalah serta menjadikannya sebagai pedoman dalam menganalisis objek penelitian.

1. **Konsep Peran**

Peran menurut Poerwadarminta adalah **“tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang dalam suatu peristiwa”.** Berdasarkan pengertian tersebut peran dapat di artikan sebagai perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di kelompok masyarakat. Peran juga merupakan aspek dinamis kedudukan (Status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya maka ia menjalankan suatu peran.

1. **Teori Hubungan Internasional**

Ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu baru dalam deretan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu Hubungan Internasional mulai berkembang pada tahun 1930. Ilmu ini berkembang terutama di Amerika Serikat dan Inggris, hal itu dikarenakan aspek-aspek yang membahas hubungan antar negara dianggap penting sebagai upaya untuk tercapainya perdamaian dunia saat itu.

The Dictionary of World Politics mengartikan Hubungan Internasional sebagai suatu istilah yang digunakan untuk melihat seluruh interaksi antar aktor-aktor negara dengan melewati batas-batas negara.[[4]](#footnote-4) 4 Interaksi aktor atau anggota masyarakat yang terjadi sebagai akibat adanya saling ketergantungan dalam masyarakat internasional. Interaksi-interaksi tersebut dapat berupa politik, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya di antara aktor-aktor negara dan aktor-aktor non negara.

Mochtar Ma’soed mendefinisikan hubungan internasional sebagai interaksi antar aktor internasional, yaitu sebagai berikut:

**Hubungan internasional juga didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, kesatuan subnasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu - individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara, didalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi,perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional.[[5]](#footnote-5)**

Menurut Theodore A Coulombis dan James H. Wolfe dalam buku Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power, Hubungan Internasional adalah:

**Suatu studi mengenai pola-pola aksi dan reaksi antara Negera-negara yang berdaulat yang diwakili oleh elit-elit pemerintahannya. Aktivitas-aktivitas diplomasi dan tantara yang melaksanakan politik luar negeri pemerintah Negara-negara tersebut tidak lepas dari balance of power (perimbangan kekuatan), pencapaian kepentingan nasional, usaha untuk menemukan world order (keteraturan tata dunia) dan diplomasi yang prudence (hati-hati).[[6]](#footnote-6)**

Berdasarkan pengertian tersebut maka hubungan internasional tujuannya untuk melihat bagaimana perilaku aktor dalam interaksi internasional, yang diaplikasikan dalam bentuk kerjasama, pembentukan aliansi, perang dan konflik. Hubungan internasional juga mengkaji masalah Politik Luar Negeri yang dipengaruhi oleh kepentingan nasional.

1. **Organisasi Internasional**

Hubungan Internasional dewasa ini tidak terlepas dari peran organisasi internasional. Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional (dunia) secara sukarela atau dasar kesamaan yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia dalam tananan hubungan internasional. Dan yang harus kita garis bawahi adalah bahwa anggota-anggota yang membentuk organisasi inetrnasional tersebut harus memiliki visi dan tujuan yang sama walaupun nantinya untuk misi akan didiskusikan kembali. Pengertian organisasi internasional menurut **D.W.Boweet** merupakan:

**“organisasi yang dibentuk secara permanen yang didirikan atas dasar sebuat traktat (kesepakatan) yang lebih bersifat multilateral daripada bilateral dengan tujuan-tujuan tertentu.”[[7]](#footnote-7)**

Kemudian ada juga pengertian lainnya seperti yang diungkapkan oleh **Starke** Dalam buku”An introduction to international law”, starke membandingkan fungsi, hak, dan kewajiban serta wewenang berbagai organ lembaga internasional dengan negara yang modern. Starke menegaskan ”pada awalnya seperti fungsi suatu negara modern mempunyai hak, kewajiban, dan kekuasaan yang dimiliki beserta alat perlengkapannya, semua itu diatur oleh hukum nasional yang dinamakan Hukum Tata Negara sehingga dengan demikian organisasi internasional sama halnya dengan alat perlengkapan negara modern yang diatur oleh hukum konstitusi internasional”.[[8]](#footnote-8)

Organisasi-organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antar-bangsa untuk adanya wadah serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional. Secara untuk mengkoordinasikan kerjasama antar-negara dan antar-bangsa kearah pencapain tujuan yang sama dan yang perlu diusahakan secara bersama-sama. Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu actor dalam hubungan internasional.[[9]](#footnote-9)

Apabila suatu Negara menghadapi krisis pangan, peran organisasi internasional sangat diperlukan untuk membantu menangani krisis yang terjadi di Negara tersebut. Organisasi internasional merupakan konsep yang dibawa oleh perspektif liberalisme. Perspektif liberalism, yang memandang bahwa hakikat dari manusia adalah baik dan percaya perdamain abadi (*perpetual peace*) dapat diwujudkan melalui kerjasama. Perspektif ini menganggap bahwa masalah-masalah di dunia internasional termasuk krisis pangan dapat diatasi dengan membentuk suatu kerjasama dan dengan mendirikan organisasi internasional.

Pandangan liberalis lebih menekankan kepada pemikiran yang positif dan optimis yang pada dasarnya ada pada diri manusia, tidak suka berkonflik dan mau bekerjasama serta memakai rasionalitas serta hal-hal yang masuk akal dalam menghadapi suatu permasalahan atau perdebatan yang sedang terjadi. Sehingga tidak ada kerugian yang didapatkan jika terjadi permasalahan-permasalahan internasional yang melibatkan adanya suatu kondisi dimana kedua belah pihak mendapati kejanggalan dalam penyelesaiannya. Karena pandangan liberalis mengedepankan interdependensi dan kerjasama.

Perspektif ini menganggap bahwa masalah-masalah di dunia internasional dapat diatasi dengan membentuk suatu kerjasama dan dengan mendirikan organisasi internasional. Graham Evans dan Jefferey Newnham mendefinisikan organisasi internasional sebagai suatu institusi formal yang dibentuk dari adanya perjanjian antar aktor-aktor didalam hubungan internasional.

Pendapat lain dikemukakan oleh **Teuku May Rudy,** beliau mendefinisikan organisasi internasional sebagai.

**“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan/diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesame kelompok non pemerintah pada dasar Negara yang berbeda”.[[10]](#footnote-10)**

Menurutnya, peran Organisasi Internasional adalah wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mengurangi intensitas konflik antar sesame anggota, sebagai sarana perundingan untuk menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan da nada kalanya bertindak sebagai lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monument bersejarah, *peace keeping, operation*, dan lain sebaginya).

Organisasi internasional terbagi atas dua kategori utama yaitu *Inter Governmental Organization* (IGO) dan Non *Governmental Organization* (NGO). IGO adalah organisasi yang didirikan beberapa Negara untuk mencapai tujuan bersama. IGO pada proses kerjanya lebih dominan melakukan kerja-kerja yang mengarah kepada pembentukan consensus, sedangkan NGO lebih mengarah ke kerja-kerja yang sifatnya teknis. Ciri-ciri IGO adalah dibentuk oleh dua Negara atau lebih, bersidang secara teratur, mempunyai sifat yang tetap dan keanggotaannya sukarela. Melihat dari keanggotan dan tujuan yang dimiliki, WFP termasuk dalam IGO, dan keanggotaannya umum dengan tujuan terbatas (*general membership and limited purpose*).[[11]](#footnote-11) WFP sebagai salah satu organisasi internasional berperan sebagai mediator dari pemerintah dunia dan juga pihak swasta dalam menyalurkan bantuan pangan kepada orang didunia dan membantu suatu Negara untuk mencapai tujuannya yaitu mencapai ketahanan pangan yang dimandatkan oleh World Food Summit, dalam hal ini krisis pangan yang tengah berlangsung di Venezuela.

Sedangkan definisi dari NGO memiliki gambaran yang sangat beragam, heterogen dengan tujuan, struktur dan motivasi yang sangat bervariasi. Vakil mendefinisikan NGO sebagai *Self-governing,* swasta, organisasi non-profit yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup orang yang kurang beruntung.[[12]](#footnote-12) NGO merupkan istilah yang mencakup beragam organisasi. NGO bisa merupakan lembaga swasta yang mendukung pembangunan internasional, atau kelompok agama atau kelompok adat yang terorganisir secara nasional maupun regional.

1. **Politik Luar Negeri**

Politik luar negeri adalah arah kebijakan suatu negara dan proses sebuah negara dalam memperjuangkan kepentingan di dalam hubungannya dengan negara lain. Menurut Jack C. Plano dan Ray Olton dalam buku Kamus Hubungan Internasional mengatakan bahwa:

**Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminology kepentingan nasional.[[13]](#footnote-13)**

Politik Luar Negeri berisi tujuan suatu negara, cara mencapai tujuan, dan cara mengelola sumber daya alam agar negara dapat besaing dengan negara-negara lain. Politik Luar Negeri merupakan langkah negara dalam mengambil tindakan berdasarkan kondisi internasional.

1. **Kepentingan Nasional**

Konsep kepentingan nasional merupakan dasar dalam memahami perilaku internasional suatu negara. Kepentingan nasional merupakan upaya negara dalam megejar power untuk dapat mengembangkan kekuasaan atas negara lain. Menurut Donald E. Nuechterlin sedikitnya menyebutkan empat jenis dimensi kepentingan nasional, yaitu kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tata internasional, dan yang terakhir kepentingan ideologi.[[14]](#footnote-14)

Hans J Morgenthau mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut:

**Kepentingan nasional sebagai power (pengaruh, kekuasaan dan kekuatan) atau kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik.[[15]](#footnote-15)**

Kepentingan nasional juga sebagai tujuan fundamental yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.[[16]](#footnote-16)

Dari definisi diatas kepentingan nasional merupakan tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai kepentingan nasional.

1. **Ketahanan Pangan (*Food Security*)**

Ketahanan pangan menjadi salah satu fokus yang cukup krusial di mata global baik oleh pemerintah mapun organisasi-organisasi internasional. Ketahanan pangan didefinisikan pada World Food Summit 1974 sebagai *:“Availability at all times of adequate world food supplies of basic foodstuffs to sustain a steady expansion of food consumption and to offset fluctuations in production and prices”[[17]](#footnote-17)* Krisis pangan terjadi karena ketidak mampuan memenuhi standar ketahanan pangan yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat dikawasan tertentu baik secara kualitas maupun kuantitasnya untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

Krisis pangan identik dengan *food security* (ketahanan pangan). Dengan tercapainya food security, maka krisis pangan akan teratasi. Pada tahun 1986, laporan dari World Bank yaitu “Kemiskinan dan kelaparan terfokus pada dinamika temporal krisis pangan. Yang memperlihatkan perbedaan yang dapat diterima secara luas antara krisis pangan kronis, terkait dengan masalah yang berkelanjutan yang biasa disebut kemiskinan struktural dan pendapatan rendah, dan krisis pangan sementara terkait tekanan yang intens yang diakibatkan oleh bencana alam, krisis ekonomi, atau konflik. Konsep ketahanan pangan ini selanjutnya dijabarkan dengan istilah : *“Access of all people at all times to enough food for an active, healthy life”*.

Pada tahun 1996, *World Food Summit* kembali menyempurnakan definisi dari ketahan pangan sebagai :

*“Food security, at the individual, household, national, regional and global levels [is achieved] when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient,safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life”.[[18]](#footnote-18)*

Kemudian definisi ketahanan pangan kembali di deklarasikan pada *The State of Food Security* tahun 2001 sebagai :

*“Food security [is] a situation that exists when all people, at all times, have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life”[[19]](#footnote-19)*

Ketahanan pangan dapat tercapai ketika semua orang di tiap waktu, memiliki kondisi fisik, sosial, dan ekonomi yang cukup, makanan yang bergizi dan aman yang memenuhi kebutuhan gizi mereka dan pilihan makanan untuk kehidupan yang aktif dan sehat. Ketahanan pangan rumah tangga adalah aplikasi dari konsep ini pada tingkat keluarga, dengan tiap-tiap anggota keluarga sebagai fokus dari kepentingan ini. Sedangkan krisis pangan terjadi ketika individu tidak memiliki kondisi fisik, sosial dan ekonomi yang memadai untuk mengakses makanan seperti yang telah dijabarkan.

1. ***Human Security* (Keamanan Manusia)**

Kanti Bajpati (2000) mengemukakan bahwa *Human Security* adalah konsep tentang perlindungan dan penciptaan kesejahteraan bagi setiap individu warga Negara sehingga setiap individu manusia bisa mendapatkan keamanan dan kebebasan untuk memperoleh kesejahteraan mereka*.[[20]](#footnote-20)*

*Human Security* menekankan pada keadilan, emansipasi dan menghubungkan politik domestik dengan hubungan internasional, sebab gagasan *Human Security* menghadapkan Negara dan kedaulatannya pada kedaulatan individu warganya. *Human Security* berusaha menggeser pemikiran keamanan dari dominasi keamanan Negara ke keamanan manusia yang mencakup masalah kesejahteraan sosial, perlindungan HAM, kelompok minoritas, masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik. *Human Security* menghapuskan dikotomi antara pemikiran tradisional, Realis dan Non Realis, *Hard Security* dan *Soft Security*. Masalah utama yang menjadi perhatian dalam Human Security adalah demokratisasi dan HAM. *Human Security* juga dapat dideskripsikan dari pandangan sebagaimana dirumuskan oleh UNDP. Pasca perang dingin menimbulkan adanya permasalahn baru terutama di kalangan UNDP bahwa cara-cara militer tidak dapat digunakan lagi untuk mengatasi konflik internasional (sebagaimana doktrin *Traditional Security*) mengingat akar masalah dari konflik itu sangat luas dan kompleks. Atas dasar itu diperlukan pendekatan baru untuk menyelesaikan konflik berdasarkan akar masalahnya, dan akar masalah itu ternyata bersumber dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, agama, lingkungan hdiup, bencana alam, obat-obatan terlarang. Konsep baru ini bersifat holistic dan komprehensif karena menyangkut semua segi kemanusiaan, maka lahirlah konsep baru tentang keamanan dalam interaksi global yang popular disebut *Human Security Approach*.[[21]](#footnote-21)

J.Peter Burgess (2008) mengemukakan bahwa *Human Security* lahir pada satu momen sejarah yang sangat penting yang memungkinkan perlunya pertimbangan untuk merumuskan kembali tentang konsep keamanan yang lebih bisa memenuhi perkembangan isu-isu keamanan global. *Human Security* merupkan konsep keamanan yang berbeda sama sekali dengan pendahulunya (*traditional concept of security*) karena *Human Security* ini sebagai konsep baru mencoba mendefinisikan kembali tentang apa yang dimaksud aman, aman dari ancaman apa, termasuk di dalamnya *Human Security* juga mendefinisikan kembali tentang peran dan bentuk-bentuk ancaman terhadap kemanusiaan. Dalam dunia yang terus berubah, pertanyaan keamanan tidak terkait dengan geopolitik dan isu-isu keseimbangan kekuatan militer, tetapi pertanyaan tentang keamanan dan ketidakamanan lahir dari penyakit, kelaparan, pengangguran, konflik sosial, kejahatan, politik yang represif, serta terorisme.[[22]](#footnote-22)

Stephen Hoadley (2006) memberikan pandangannya tentang *Human Security* sebagai konsep baru tentang keamanan secara menarik dan menurutnya *Human Security* muncul pada saat yang tepat yaitu saat pengaruh perang dingin semakin menurun sedangkan pengaruh penyebaran faham humanitarian internasional dan perlindungan HAM semakin mendapatkan peran dalam isu-isu keamanan internasional. Hal ini menunjukkan cerminan dari adanya individualisasi hukum internasional yang secara bertahap telah diterima dimana bukan hanya Negara sebagai subyek subjek hukum internasional. Individu juga dapat menjadi subyek hukum internasioanl. Selanjutnya Stephan Hoadley menegaskan bahwa konsep *Human Security* berperan sebagai instrument legitimasi dalam intervensi humanitarian. Dan sebagai instrument intervensi humanitarian ia dapat menjadi landasan campur tangan dalam wilayah domestic suatu Negara dengan tujuan terbentuknya keamanan bagi semua.[[23]](#footnote-23)

WFP sendiri merupakan cabang bantuan pangan dari PBB dan organisasi kemanusiaan terbesar di dunia yang mengatasi kelaparan dan mempromosikan keamanan pangan. Dalam keadaan darurat seperti yang sedang terjadi di Suriah, WFP menyuplai makanan ke lokasi-lokasi yang membutuhkan, menyelamatkan jiwa korban peperangan atau konflik sipil, serta bencana alam. Setelah keadaan darurat berlalu, WFP menggunakan makanan untuk membantu masyarakat untuk membangun kembali kehidupan mereka yang telah hancur akibat perang, dan mempromosikan program ketahanan pangan berkelanjutan agar warga dari Negara yang telah mengalami konflik dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan WFP sesuai dengan tujuan organisasi WFP yaitu untuk kemanusiaan.

1. **Krisis Pangan di Yaman**

Krisis pangan di Yaman sudah mencapai pada tahap yang menghawatirkan karena hampir separuh dari populasi Yaman adalah orang miskin yang berarti juga mereka mengalami kekurangan gizi, dan banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Angka harapan hidup di Yaman juga tidak begitu tinggi yaitu hanya sekitar 64 tahun, apabila dibandingkan dengan angka harapan hidup di AS, maka angka harapan hidup di Yaman lebih muda 14 tahun. Dengan angka kemiskinan yang tinggi, banyak rakyat Yaman yang menderita penyakit dan rentan terkena penyebaran virus penyakit karena sanitasi kesehatan yang buruk.

Krisis di Yaman yang telah membuat jutaan orang kekurangan makanan dan di ambang kelaparan adalah bencana buatan manusia, menurut PBB. Auke Lootsma, Kepala Program Pembangunan PBB di Yaman mengatakan, krisis di Yaman tidak hanya didorong oleh kemiskinan puluhan tahun dan kurangnya investasi, tetapi juga oleh pencekikan ekonomi yang digunakan sebagai taktik perang. ”Tidak ada akhir yang terlihat untuk perang sipil Yaman," kata Lootsma. Ia menambahkan bahwa sekitar 70 persen dari 27 juta orang di negara itu membutuhkan bantuan kemanusiaan, 60 persen tidak tahu dari mana sumber makanan mereka dan hampir 7 juta orang sudah dekat diambang kelaparan. Lootsma mengatakan bahwa krisis pangan didorong oleh dampak kenaikan harga pangan, dan penurunan daya beli masyarakat. Terlebih lagi, banyak yang hidup dalam kemiskinan sebelum konflik dimulai. Lootsma menambahkan, PBB juga telah mencatat hampir 400.000 kasus kolera dan hampir 1.900 kematian terkait penyakit itu dalam empat bulan terakhir. Melalui konferensi video dari ibukota Yaman, Lootsma mengatakan bahwa hampir 2 juta anak-anak dianggap kekurangan gizi akut, yang membuat mereka rentan terhadap kolera. Intinya, Lootsma menekankan bahwa kebutuhan yang paling penting saat ini adalah menghentikan perang.[[24]](#footnote-24)

1. **World Food Programme di Yaman**

Hingga saat ini, WFP terus berperan aktif dalam membantu menangani masalah kelaparan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satu negara yang menjadi fokus pemberian bantuan yang dilakukan WFP adalah Yaman, yaitu negara yang masuk dalam daftar emergency WFP. Menurut laporan PBB dan Organisasi Kemanusian UNICEF, negara dengan total penduduk 28 juta jiwa ini masuk dalam daftar salah satu negara terbesar yang menderita kelaparan dan kemiskinan di dunia. Kepala Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Stephen O’Brien mengatakan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi krisis kemanusiaan terbesar sejak tahun 1945. Salah satu negara yang menghadapi krisis kemanusiaan tersebut adalah Yaman. Ada sekitar 14,1 juta penduduk Yaman menderita kelaparan, 7,6 juta diantaranya sangat bergantung pada bantuan karena mereka sudah tidak tahu harus mendapatkan makanan dari mana. Sepanjang tahun 2016 UNICEF merilis data bahwa sebanyak 63 ribu anak-anak Yaman tewas karena gizi buruk.[[25]](#footnote-25)

Laporan yang dikutip dari 69 pakar dan analis dari Yaman, PBB, UNICEF dan organisasi non-pemerintah mengatakan bahwa sekitar 10,2 juta orang dalam kondisi level ketiga atau krisis, dan lebih dari 6,8 juta masuk dalam level keempat atau tahap darurat. Menurut dokumen ini, dari 22 gubernuran yang ada di Yaman, sebanyak 20 gubernuran diantaranya menderita kekeringan dan kelaparan, di gubernuran Lahj, Taiz, Aden, Sa’ada, Hajjah dan Shabwah berada dalam level darurat. Konflik di Yaman yang menyebabkan bencana kemanusian yang terus berlanjut mendorong WFP untuk tetap berperan aktif dalam menangani krisis yang terjadi di Yaman, terutama untuk mengatasi bencana kelaparan yang diderita oleh warga Yaman. Hal ini tentu saja menjadi tantangan besar yang harus dihadapi WFP, serta menjadi arena pembuktian dari keefektivan organisasi ini di mata internasional.[[26]](#footnote-26)

1. **Sejarah Politik, Sosial dan Budaya di Yaman**

Yaman merupakan sebuah negara berkembang yang sedang dilanda krisis politik sejak pemerintahan Presiden Ali Abdullah Saleh. Saleh sudah memegang kekuasaan di Yaman selama 33 tahun. Pada Januari 2011, mengikuti revolusi Tunisia yang berhasil menggugurkan jabatan presiden Tunisia yang berlangsung selama 23 tahun lebih, serangkaian mulai demonstrasi bertebaran di ibu kota Yaman (Sana’a) menentang kemiskinan, pengangguran, dan rencana presiden Saleh untuk mengabadikan masa jabatannya. Setelah kericuhan berlangsung sampai akhir tahun, Saleh bersedia turun dari Jabatannya dan Jabatan presiden ini kemudian digantikan oleh Abd Rabbuh Mansur Hadi melalui pemilu pada 21 Februari 2012.Tetapi meskipun pemerintahan Saleh berakhir, Yaman masih memiliki konflik dengan Houti yang masih berlangsung sejak tahun 2004. Houti merupakan kelompok religius yang bermazhab Zaidiyah yang merupakan salah satu mazhab Syi’ah. Mereka menempati Yaman Utara dan dikenal dengan kekasarannya, kehebatan menembaknya, kehormatannya, dan keberaniannya dalam bertempur. Tetapi atas hal ini pula mereka dianggap bodoh atau terbelakang oleh penduduk kota Yaman seperti Sana’a atau Aden. Penduduk kota ini dikenal sebagai Syiah yang lebih moderat dan dekat dengan Islam Sunni.[[27]](#footnote-27)

Ahmed Addaghasi, seorang profesor di Universitas Sanaa, mengatakan bahwa di awal 1990-an Houti pada mulanya merupakan gerakan moderat yang menjunjung tinggi toleransi dan perdamaian. Kelompok ini bermula dari perkumpulan “believing youth forum” di awal tahun 90-an. Namun perkumpulan ini terbagi secara internal menjadi dua jalur. Yang satu lebih terbuka dan sisanya lebih masih berpegang teguh dengan pemahaman tradisional Zaidiyah. Addaghashi mengatakan bahwa ketegangan di antara pasukan keamanan Yaman dan Houti bermula ketika pendukung kelompok ini melakukan aksi protes di mesjid-mesjid ibu kota. Hal ini kemudian dianggap oleh Presiden Ali Abdullah Saleh sebagai ancaman bagi pemerintahannya. Saleh memerintahkan penahanan terhadap beberapa anggota kelompok mereka, dan memaksa pemimpin mereka Hussein al-Houthi untuk menghentikan aksi pendemo yang mengganggu para jamaah beribadah. “konflik bersenjata bermula ketika Saleh mengirimkan pasukan ke provinsi Saada untuk menangkap Hussein karena menolak untuk menghentikan aksi pendukungnya,” kata Addaghashi. Hussein al-Houthi kemudian terbunuh pada tahun 2004 setelah Saleh mengirimkan pasukan pemerintah ke Saada.[[28]](#footnote-28)

Aksi Pemberontakan kemudian berlanjut secara kecil-kecilan dan sampai perjanjian gencatan senjata pada 30 Januari 2010. Perjanjian ini dilakukan dengan harapan untuk menghentikan konflik bersenjata yang sudah berlangsung selama 6 tahun dan yang telah mulai merembes ke negara tetangga yakni Arab Saudi. Namun pada 31 Januari, pemerintahan Yaman menolak perjanjian tersebut dan melancarkan serangan baru dan 24 orang menjadi korban.[[29]](#footnote-29) Pada November 2011, Houti menyatakan bahwa mereka telah mengambil alih dua wilayah Yaman yakni Saada dan Al Jawf dan sudah hampir mengambil alih Hajjah.[[30]](#footnote-30) Dengan wilayah ini mereka akan dengan mudah meluncurkan serangan langsung ke Ibu Kota Yaman (Sana’a). Pada Mei 2012, dilaporkan bahwa Houti telah mengambil alih Saada, Al Jawf, dan Hajjah.[[31]](#footnote-31)

## Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah dan kerangka teoritis diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan suatu hipotesis sebagai berikut: **Dengan adanya World Food Programme melalui program seperti *Special Operation dan Emergency Operation* maka tingkat krisis pangan di Yaman akan berkurang dengan di tandai berkurangnya penduduk yang menderita kelaparan atau kekurangan gizi.**

## Operasional Variable dan Indikator

Untuk membantu dan menganalisis penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat suatu definisi oprasional variabel dan indikator konsep hipotesis di atas yaitu:

**Tabel 1 Verifikasi Variable dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variable dalam Hipotesis (Teoritik) | Indikator (Empirik) | Verifikasi (Analisi) |
| Variabel Bebas: Dengan adanya World Food Programme melalui program seperti Special Operation dan Emergency Operation | FAO turut andil melalui WFP dengan program – program seperti Special Operation dan Emergency Operation | 1. Pada April 2017, WFP meluncurkan program Emergency Operations untuk membantu 6,8 juta orang, dengan General Food Assitance nya melalui keranjang makanan enak dan voucher komoditas dan juga 2,9 juta bantuan nutrisi penting.  <https://docs.wfp.org/api/documents/95fe64a88e6f448ca07b03c6b91baf83/download/?_ga=2.180610017.756353720.1526308305-1194793953.1521046747> |
| Variabel Terikat: maka tingkat krisis pangan di Yaman akan berkurang dengan di tandai berkurangnya penduduk yang menderita kelaparan atau kekurangan gizi. | Dengan pengoptimalan program seperti Special Operation dan Emergency Operation yang dilakukan oleh FAO melalui WFP dan organisasi lain akan mengurangi krisis pangan di yaman dengan di tandai berkurangnya penduduk yang menderita kelaparan atau kekurangan gizi | Merupakan target WFP untuk memgurangi bahkan menghilangkan krisis pangan di yaman bahkan di dunia, namun layaknya organisasi kemanusiaan lain WFP terkendala oleh masalah pendanaan dan sulitnya mendistribusikan sumber daya. Pesan dari Program Pangan Dunia itu sederhana: akhiri konflik dan kita bisa mengakhiri kelaparan.  https://insight.wfp.org/we-can-end-world-hunger-but-only-if-we-end-the-conflicts-5697c3909945 |

## Skema Kerangka Teoritis

**Gambar 1 Skema dan Alur Penelitian**

Food and Agriculture Organization (FAO)

WFP (*World Food Programme*)

Program *Special Operation dan Emergency Operation*

WFP berkerjasama dengan OI lain seperti UNICEF,WHO, dan the *Nutrition Cluster Partners*

Maka tingkat krisis pangan di Yaman akan berkurang.

1. Elin Dewanti. “Peranan World Food Programme (WFP) Melalui Program Food For Assets (FFA) Dalam Upaya Mengurangi Potensi Rawan Pangan Di Indonesia”. Diakses melalui <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/699/jbptunikompp-gdl-elindewant-34922-10-unikom_e-v.pdf> diakses pada 29 maret 2018. [↑](#footnote-ref-1)
2. Olvie Tryani Pontoh.”Peranan World Food Programme Terhadap Penanganan Krisis Pangan di Suriah”. Diakses melalui <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19307/SKRIPSI%20%28BAB%201%2C3%2C5%29%20OLVIE%20TRYANI%20PONTOH.pdf?sequence=1> diakses pada 29 maret 2018. [↑](#footnote-ref-2)
3. I Gede Made Ngurah Perdana Yoga Yanugeraha “Upaya World Food Programme Dalam menangani ketidaktangguhan pangan di Sierra Leone”. Diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/14732/9947>. Diakses pada 04 Mei 2018. [↑](#footnote-ref-3)
4. Anak Agung BanyuPerwita &amp; Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu. Hubungan

   Internasional (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005) hlm. 4 diakses pada 18 april 2018 [↑](#footnote-ref-4)
5. Mochtar Mas’oed dalam bukunya IlmuHubungan Internasional: Disiplin dan Metologi

   (LP3ES, 1994), hlm. 28. [↑](#footnote-ref-5)
6. Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe, Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power (Terjemahan Marcedes Marbun) Jakarta: Putra A. Bardin, hlm. 24 [↑](#footnote-ref-6)
7. <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/371/jbptunikompp-gdl-dewitriwah-18515-1-babi(p-).pdf> diakses pada 18 april 2018 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid. [↑](#footnote-ref-8)
9. A.A, Perwita, & Y.M. Yani,(2005).”Pengantar Ilmu Hubungan Internasional”,Bandung: Remaja Rosdakarya. Diakses pada 28 april 2018. [↑](#footnote-ref-9)
10. Teuku May Rudy, Administrasi dan Organisasi Internasional, Bandung: Refika Aditama, 2005, Hal 3-4, diakses pada 28 April 18 [↑](#footnote-ref-10)
11. Kelly Kate Pease. 2000. Internasional Organization: Perspective on Governance in Twentieth First Century.New Jersey: Prentice Hall. Hal. 276 [↑](#footnote-ref-11)
12. Citra Hennida, Rezim dan Organisasi Internasional, hlm. 60. [↑](#footnote-ref-12)
13. Jack C. Plano dan Roy Olton, Kamus Hubungan Internasional, (Terjemahan Wawan Juanda dan Putra A. Bardin) Bandung, 1999) hlm 155. [↑](#footnote-ref-13)
14. Dinda Arumsari, “Kepentingan Nasional dalm Hubungan Internasional”, web.unair.ac (Online), 30 September 2014 dalam http://dinda-arumsari- laksono-fisip14.web.unair.ac.id/artikel\_detail-112185 (SOH101)%20Pengantar%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional-Kepentingan%20Nasional%20dalam%20Hubungan%20Internasional.html, diakses pada 31 Maret 2018. [↑](#footnote-ref-14)
15. Coloumbus, Theodore A. and James H. Wolfe. 1981. “Introduction to International relations, Power, and Justice. New Delhi: Prentice Hall of India”. [↑](#footnote-ref-15)
16. Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional.* Bandung: Abardin, hal 11 [↑](#footnote-ref-16)
17. United Nations. 1975. Report of the World Food Conference, Rome 5-16 November 1974. New York diakses pada 23 april 2018. [↑](#footnote-ref-17)
18. FAO. 1996. Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action. World Food Summit 13-17 November 1996. Rome. Diakses pada 23 april 2018. [↑](#footnote-ref-18)
19. FAO. 2002. The State of Food Insecurity in the World 2001. Rome. Diakses pada 23 april 2018. [↑](#footnote-ref-19)
20. Bajpai. K, Human Security : Concept and Measurement, kroc Intitute Occasionalapaper#19:OP:1, School for International Studies Jawaharlal Nehru Universities, New Delhi, 2000 hal. 3. Diakses pada 28 april 2018. [↑](#footnote-ref-20)
21. United Nation Depelopment Programme, “Redefening Security : The Human Dimension” Current History vol. 94, 1994, halaman 229-236. diakses pada 28 april 2018.

    [↑](#footnote-ref-21)
22. Burgess, Peter J, Non Military Security Challenges in Synder, Craig A, 2008, Contemporary Security and Strategy 2nd Edition, Palgrave Macmillan, New York, 2008, hal. 63-64, diakses pada 28 april 2018. [↑](#footnote-ref-22)
23. Hoadley, Stephen, The Evolution of Security Thinking : An Overview, in Hoadley, S. and Ruland, Jurgen, (2006), Asian Security Reassessed, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore :Halaman20-22. [↑](#footnote-ref-23)
24. <http://news.rakyatku.com/read/59111/2017/08/02/pbb-krisis-pangan-yaman-adalah-taktik-perang> diakses pada 4 juli 2018 [↑](#footnote-ref-24)
25. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18409/5.%20BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y> diakses pada 4 juli 2018 [↑](#footnote-ref-25)
26. <https://www.antaranews.com/berita/661763/wfp-makanan-jadi-senjata-perang-di-yaman> diakses pada 4 juli 2018 [↑](#footnote-ref-26)
27. Freeman, Jack (2009). "The al Houthi Insurgency in the North of Yemen: An Analysis of the Shabab al Moumineen". Studies in Conflict & Terrorism 32 (11): 1008–1019 [↑](#footnote-ref-27)
28. Batati, S. A. (2015, Maret 29). Who are the Houthis in Yemen? Dipetik Agustus 2015, 2015, dari AL Jazeera: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/08/yemen-houthis-hadi-protests-201482132719818986.html [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-29)
30. Islam TImes. (2011, November 9). Houthis Close to Control Hajjah Governorate, Amid Expectations of Expansion of Control over Large Parts of Northern Yemen. Dipetik Agustus 23, 2015, dari Islam Times: http://www.islamtimes.org/en/doc/news/112627/ [↑](#footnote-ref-30)
31. Fattah, K. (2012, Mei 11). Yemen's Sectarian Spring. Dipetik Agustus 23, 2015, dari Carnegie Endowment for International Peace: http://carnegieendowment.org/sada/?fa=48095 [↑](#footnote-ref-31)